

TESIS

PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM



Oleh:

ZULFI MA'RUF

2120215310070

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

JULI 2023

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI
ASPEK POLITIK HUKUM**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

**ZULFI MA'RUF
NIM. 2120215310070**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

JULI 2023

Judul Tesis : Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Pemerintahan Desa Ditinjau dari Aspek Politik Hukum

Nama : Zulfi Ma'ruf
NIM : 2120215310070

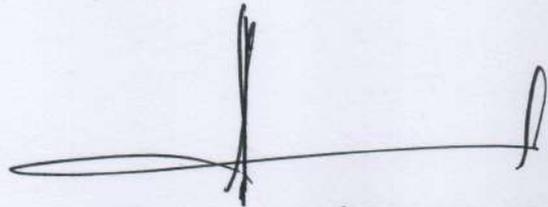
**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama



Dr. Hj Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502200112 2 002

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

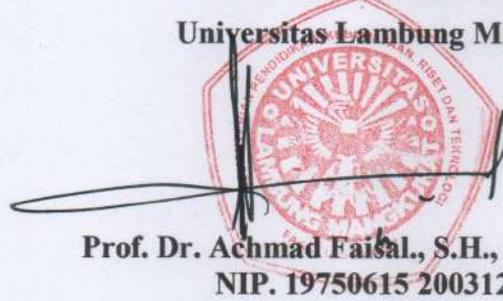
Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

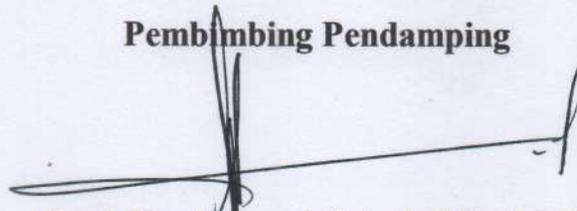
**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing utama



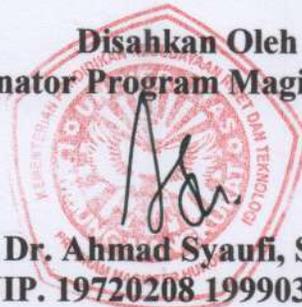
**Dr. Hj Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502200112 2 002**

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

BAIT PEMBUKA

Berbicara politik sebagai debat pertengkaran fikiran demi kebijakan, bukan kasak-kusuk elit yang situ-sini berebut akan kekuasaan.

Berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius.

Saat pemimpin menimbang opsi untuk dipilih, realitas politik memang tidak pernah hitam-putih.

Ketika tidak banyak pilihan yang tersedia, kembalilah pada suara pemilih yang setia.

Pemimpin yang dipilih rakyat niscaya akan mendengarkan, keluh dan harap rakyat adalah denyut negarawan.

Pada zaman yang bergerak begitu dinamis, anak muda tak cukup hanya postang-posting hal yang manis.

Segalanya menjadi mungkin di era serba digital, anyamlah dunia baru dengan tangan yang terus memintal.

Jungkirbalikkan segala cibiran dengan berani, jikapun jatuh toh masih ada lagi esok hari.

Kreativitas adalah mata uang yang tidak terukur, ide-ide dan eksekusi meski lekas dibikin kabur.

Sangat banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab, tak cukup sekadar berontak dan bergerak tanpa sebab.

Ditangan pemuda segala yang muskil bisa menjadi riil, anak muda adalah antitesis segala yang mustahil.

Kita adalah sepucuk surat bagi masa depan, kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan.

ZULFI MA'RUF (*BHANGZUL*)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Zulfi Ma'ruf
NIM : 2120215310070
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Penelitian Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau fikiran saya sendiri.
2. Dalam penelitian ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Penelitian Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 27 Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan

Matrai 10000

Zulfi Ma'ruf
NIM. 2120215310070

Ma'ruf, Zulfi. 2023 PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM. Program Magister Hukum. Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Dr. Hj Erlina, S.H.,M.H.** dan Pembimbing Pendamping: **Prof.,Dr Achmad Faisal, S.H.,M.H.** 100 halaman.

RINGKASAN

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah begitu luas, sehingga dalam menjalankan pemerintahan harus melimpahkan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah, yaitu Kepala Daerah dan DPRD menurut asas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dari sisi historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Dalam hubungan organisasi pemerintahan Hindia Belanda, Desa diakui sebagai suatu kesatuan hukum yang berdasar pada adat. Hakim-hakim Desa diakui secara resmi pada tahun 1935. Era reformasi seakan memberikan angin segar bagi desa. Eksistensi desa kembali mendapat pengakuan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyadari bahwa penyeragaman nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa tidak sesuai lagi dengan semangat UUD 1945 dan perlunya menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa.

Penyelenggaraan pemerintahan di desa yang menitikberatkan pada pentingnya melibatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat sebagai bentuk partisipasi yang sistem, bukan yang teknis, hal ini dikatakan sangat penting karena penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa “berbeda” dengan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di tingkat atasnya karena konsep kehidupan bersama dan gotong royong di desa masih sangat kuat. Disebutkan bahwa dalam politik hukum (*legal policy*) pemerintahan desa dalam berbagai peraturan perundang-undangan terjadi ketidak-teraturan dan tumpang tindih sejak zaman kolonial hingga saat ini. Hal ini disebabkan adanya beberapa kelemahan dalam UUD 1945 yakni: (a) memberikan porsi kekuasaan besar kepada presiden, (b) UUD 1945 tidak memuat sistem *check and balances*, (c) UUD 1945 memuat ketentuan yang tidak jelas atau multi tafsir (d) adanya penjelasan dalam UUD 1945 sebelum perubahan, dan (e) UUD 1945 memuat ketentuan yang harus diatur dalam undang-undang. Lahirnya UU No.6/2014 tentang Desa merupakan gambaran itikad negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa. Dalam hal ini keterkaitannya dengan peran pemerintah daerah utamanya adalah badan legislatif atau biasanya kita menyebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) skala kabupaten sebagai penganut asas otonomi yang seluas-luasnya. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini bermakna bahwa DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan Kepala Daerah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu, relasi kemitraan antara DPRD dengan Kepala Daerah merupakan prasyarat mutlak dalam proses berpemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah maka sejauh mana implementasi peran dan tanggung jawab DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah tanpa terkecuali skala desa sekalipun. Dengan latar belakang dimaksud, penulis melakukan penelitian dengan judul **Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Pengawasan Pemerintahan Desa ditinjau dari Aspek Politik Hukum**.

Dari pelaksanaan penelitian diperoleh hasil, bahwa peran DPRD Kabupaten dalam pengawasan pemerintahan desa meninjau teori politik hukum, pada hakikatnya tidak ada hal yang istimewa dalam menjalankan fungsinya selaku unsur penyelenggara pemerintahan. Reformulasi hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD juga BPD dan Kepala Desa ini sangatlah penting supaya dana yang dikelola dengan jumlah yang sangat fantastis dan tidak pernah diatur dalam undang-undang sebelumnya tersebut tidak diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. sehingga dana tersebut dipergunakan sebesar-besarnya untuk mengangkat harkat, martabat, serta kemakmuran masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan; Kemudian mengenai fungsi pengawasan DPRD diberikan hak interpelasi, hak angket dan hak untuk menyampaikan pendapat. Secara normatif fungsi pengawasan DPRD sebagai pencerminan kehidupan demokrasi di daerah, yang harapannya adalah sebagai sarana *check and balance* dalam pemerintahan di daerah. Namun sejauh ini pengawasan DPRD belum dijalankan secara efektif, mengingat bahwa DPRD juga merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. Peran DPRD yang didesain oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sudah ideal dalam konteks demokrasi di Indonesia dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai pola hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah adalah pola hubungan kemitraan, yang sama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, sehingga tidak ada yang lebih tinggi diantara keduanya, serta diperlukan adanya visi yang sama yang bukan saja didasari oleh sistem peraturan yang ada tetapi juga termasuk kesepakatan-kesepakatan etis dan didasari nilai-nilai budaya lokal, sehingga terjadi harmonisasi hubungan yang menghasilkan kinerja sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Adapun dinamika politik yang berkembang dalam masyarakat menjadi salah satu penentu terpilih atau tidaknya seorang kandidat mewakili rakyat. Dinamika politik yang dimaksud mencakup berbagai aspek seperti aspek budaya, sosial, agama hingga ekonomi. Demikian pula dengan potensi keterpilihan seorang kandidat dalam kontestasi politik. Memaknai kontestasi politik saat ini menjadi rujukan adalah tentang menuju pemilu serentak 2024, masing-masing kandidat petahana DPRD maupun bakal caleg mendatang seolah sedang memainkan perannya di setiap wilayah tak terkecuali pedesaan yang notabene menjadikannya wilayah menggiurkan karena rawannya desa ditunggangi kepentingan politis, mengingat desa relatif mudah dijadikan kantong suara dalam Pemilu atau Pilkada. Hal ini didukung oleh fakta bahwa 50,8% penduduk Indonesia hidup di desa.

Ma'ruf, Zulfi. 2023 PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM. Program Magister Hukum. Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Dr. Hj Erlina, S.H.,M.H.** dan Pembimbing Pendamping: **Prof.,Dr Achmad Faisal, S.H.,M.H.** 100 halaman.

ABSTRAK

Kata kunci : DPRD, politik, dan komitmen yang tinggi sebagai wakil rakyat.

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini bermakna bahwa DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan Kepala Daerah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu, relasi kemitraan antara DPRD dengan Kepala Daerah merupakan prasyarat mutlak dalam proses berpemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah maka sejauh mana implementasi peran dan tanggung jawab DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah tanpa terkecuali skala Desa sekalipun. Dengan latar belakang dimaksud, penulis melakukan penelitian dengan judul Peran DPRD Kabupaten dalam Pengawasan Pemerintahan Desa ditinjau dari aspek politik Hukum.

Dari pelaksanaan penelitian diperoleh hasil, bahwa peran DPRD Kabupaten dalam pengawasan pemerintahan desa meninjau teori politik hukum, pada hakikatnya tidak ada hal yang istimewa dalam menjalankan fungsinya selaku unsur penyelenggara pemerintahan.

Peran dan fungsi DPRD dapat optimal apabila didukung dengan sumber daya manusia yang cukup dan punya komitmen yang tinggi, bahwa mereka adalah sebagai wakil rakyat dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diwakilinya.

Ma'ruf, Zulfi. 2023 THE ROLE OF THE DISTRICT REGIONAL COUNCIL OF PEOPLE'S REPRESENTATIVES IN SUPERVISION OF VILLAGE GOVERNMENT VIEWED FROM LEGAL POLITICAL ASPECT. Master of Laws Program. Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Adviso: Dr. Hj Erlina, S.H.,M.H. and Counselor: Prof., Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. 100 pages.

ABSTRACT

Keywords: DPRD, politics, and high commitment as people's representatives.

Whereas the administration of regional government is in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, regional government, which regulates and manages government affairs on its own according to the principles of autonomy and co-administration, is directed at accelerating the realization of social welfare through improvement, service, empowerment, and participation society, as well as increasing regional competitiveness by taking into account the principles of democracy, equity, justice, privileges and specificity of a region within the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

The implementation of government affairs by the regional government and DPRD according to the principle of autonomy and co-administration with the principle of broadest autonomy in the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This means that the DPRD has the same responsibility together with the Regional Head to achieve the objectives of administering regional government as mandated in Law number 23 of 2014 concerning Regional Government. Therefore, the partnership relationship between the DPRD and the Regional Head is an absolute prerequisite in the process of good governance in order to realize people's welfare.

In the perspective of running regional government, how far is the implementation of the roles and responsibilities of the DPRD as an element of regional government administration in realizing the government's vision and mission without exception even at the village scale. With this background, the authors conducted research entitled The Role of the Regency DPRD in Oversight of Village Administration in terms of legal and political aspects.

From the implementation of the research, it was found that the role of the Regency DPRD in supervising village government reviewing legal political theory, in essence there is nothing special in carrying out its functions as an element of government administration.

The role and function of the DPRD can be optimal if it is supported by sufficient human resources and has a high commitment, that they are representatives of the people and strive to improve the welfare of the people they represent.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan salawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Judul “PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM”. Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesai Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu dan Ayah, saudara serta keluarga yang selalu memberikan do'a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sekaligus pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj Erlina, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan keilmuan selama perkuliahan.
7. Bapak Jaya, Ibu Arbainah, dan bapak Agus Staf Prodi Magister Hukum Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
8. Sahabat dan teman-teman Penulis terima kasih atas bantuan, pemikiran, kritikan yang membangun, saran dan motivasi serta doa yang kalian berikan.
9. Teman-teman penulis angkatan 2021 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas Hukum Tata Negara terima kasih atas waktu kebersamaan dan kenangan indah yang takkan terlupakan.

10. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai.

Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya. Aamiin Yaa Rabbal Allamin.

Wassalam.

Banjarmasin, Juli 2023
Hormat Penulis,

Zulfi Ma'ruf, S.IP.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| HALAMAN DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL DALAM | |
| HALAMAN PERSETUJUAN | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| BAIT PEMBUKA | i |
| PERNYATAAN | ii |
| RINGKASAN..... | iii |
| ABSTRAK..... | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 11 |
| F. Metode Penelitian | 17 |
| G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan | 19 |
| BAB II | |
| IMPLEMENTASI PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM | |
| PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH..... | 21 |
| A. Teori politik hukum (<i>grand theory</i>) | 21 |
| B. Implementasi Pengawasan DPRD Kabupaten dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> | 36 |
| C. Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 39 |
| D. Mewujudkan <i>Good Governance</i> | 42 |
| BAB III | |
| POLITIK HUKUM TERKAIT PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| KABUPATEN TERHADAP PEMERINTAHAN DESA | |
| | 56 |
| A. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Konstitusi dan Politik | |
| Hukum di Indonesia..... | 56 |
| B. Kronologi Kontestasi Ajang 5 Tahunan Pemilihan Umum | |
| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..... | 69 |
| C. Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu dan Pemilihan..... | 76 |
| D. Politik Hukum Pemerintahan Desa | |
| (Kajian Teoritis UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa) | 83 |

| | |
|-----------------------|----|
| BAB IV | |
| PENUTUP | 98 |
| A. Kesimpulan | 98 |
| B. Saran | 99 |
| DAFTAR PUSTAKA | |